

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pada prinsipnya pembangunan harus mencerminkan seluruh perubahan masyarakat atau adaptasi terhadap seluruh sistem sosial, dengan tidak melupakan keragaman kebutuhan dan keinginan dasar individu dan kelompok sosial di dalamnya, untuk mencapai kehidupan yang lebih menyeluruh. kondisi, baik material maupun psikologis. Dan hakekat pembangunan nasional adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan tujuannya adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dan pembangunan nasional dilakukan bersama oleh masyarakat dan pemerintah.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)(B. A. Putra 2020). Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek(BPS 2021). Sebab itu salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin.

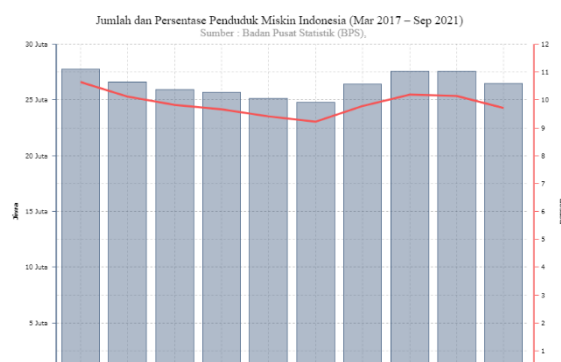
Pembangunan merupakan proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang, dalam hal ini pembangunan dapat menghasilkan tambahan nilai dan guna dari objek pembangunan(Sutiarso 2018). Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya seringkali mempunyai standar keberhasilan, umumnya standar yang ditetapkan pada tujuan akhir pembangunan dapat dilihat melalui dimensi-dimensi pembangunan yang telah dicanangkan sebagai sasaran, sehingga pelaksanaan pembangunan memiliki kejelasan orientasi serta target yang dapat dinilai secara riil(Tampubolon 2022). Dimensi pembangunan dapat dilihat melalui bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia dan hukum politik(Amam and Harsita 2019).

Kemiskinan dan ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi) merupakan dua masalah besar yang banyak terjadi di negara sedang berkembang , tidak terkecuali pada Indonesia(Chalmers 2017). Tingginya persentase penduduk miskin dalam suatu wilayah menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dikarenakan pendapatan perkapita mereka rendah(BPS Provinsi Lampung 2020). Keadaan ini diperparah lagi jika tingkat pengangguran dalam wilayah tersebut juga tinggi. melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga front(Nuryanti and Soebagijo 2021), yaitu: (i) pertumbuhan ekonomi yang luas dan miskin; (ii) pengembangan SDM (pendidikan,

kesehatan, dan gizi), yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi; dan (iii) membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka diantara penduduk miskin yang sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesempatan pengembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan terisolasi secara fisik(Yao and Zhang 2021). Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan, diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantarannya dapat dibagi menurut waktunya, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang(Statistik 2019).

Keberhasilan Provinsi Lampung dalam pembangunan Ketenagakerjaan mengalami perubahan yang mendasar selama sepuluh tahun terakhir ini. Perubahan ini disebabkan karena terjadinya perubahan komposisi lapangan kerja industri dan jabatan dalam dunia kerja, perubahan teknologi di dalam tempat kerja dan restrukturisasi perusahaan(Melyansyah and Kurniawan 2020). Lampung merupakan salah satu lumbung pangan nasional, karena sebagian besar tanaman pangan, hasil perkebunan dan perikanan ada di Lampung. Adapun beberapa contoh komoditas unggulan yang menjadi produk unggulan Lampung antara lain jagung, coklat, gula, kopi, ubi kayu, udang, dan nanas(Sulistiowati 2014). Jagung misalnya, Lampung merupakan podusen jagung nomor tujuh di Indonesia. Selanjutnya coklat, produksi coklat Lampung merupakan produksi coklat nomor enam terbesar di Indonesia(Kecamatan, Jaya, and Barat 2016). Untuk hasil tebu yang diolah menjadi gula, Lampung merupakan produsen gula nomor empat di Indonesia. Selanjutnya adalah kopi Lampung(Jeklin 2016). Lampung merupakan produsen kopi nomor dua di Indonesia. Lampung juga merupakan produsen ubi kayu, udang, dan nanas nomor satu di Indonesia. Untuk penghasil udang, Lampung sebagai penghasil udang terbesar yang berkontribusi sebesar 60 persen nasional. Walaupun Lampung merupakan lumbung pangan nasional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung merupakan IPM terendah di Sumatera. Angka IPM Lampung Tahun 2017 mencapai 68,25%(Lampung 2021). IPM merupakan gabungan dari komponen Perekonomian, Pendidikan, dan Kesehatan.

**Tabel 1.1 Diagram Tingkat Kemiskinan Di Indonesia**



***Sumber Data: persentasi penduduk miskin 2021. Badan Pusat Statistik Indonesia***

Tabel 1.1 Diatas menunjukkan bahwa erekonomian domestik yang membaik mendorong turunnya angka kemiskinan di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang 1,04 juta jiwa menjadi 26,5 juta jiwa pada Maret 2021 dibanding Maret 2021(Badan Pusat Statistik 2016). Jika dibanding September 2020, jumlah penduduk miskin juga berkurang 1,05 juta jiwa.

Berdasarkan wilayah(Badan Pusat Statistik 2016), jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang 730 ribu jiwa menjadi 14,64 juta jiwa (12,53%) pada September 2021 dibanding Maret 2021 dan juga berkurang 870 ribu jiwa dibanding September 2020. Sedangkan jumlah penduduk miskin di perkotaan berkurang 320 ribu jiwa menjadi 11,86 juta jiwa (7,6%) pada September 2021 dibanding posisi Maret 2021 serta berkurang 180 ribu jiwa dibanding September 2020(BPS Lampung 2021). Sebagai indikator untuk mengukur kemiskinan pada September 2021, garis kemiskinan nasional sebesar Rp 486,17 ribu per kapita per bulan. Dengan rincian, Rp 360 ribu per kapita per bulan untuk kebutuhan makanan dan Rp 126,16 ribu per kapita per bulan untuk kebutuhan non-makanan.

Garis kemiskinan untuk daerah perdesaan sebesar Rp 464,47ribu per kapita per bulan pada September 2021. Dengan rincian Rp 355,3 ribu per kapita per bulan untuk makanan dan Rp 109,08 ribu per kapita per bulan untuk non-makanan. Sedangkan, garis kemiskinan di daerah perkotaan Rp 502,73 ribu per kapita per bulan, dengan rincian, sebesar Rp 363,84 ribu per kapita per bulan untuk makanan dan Rp 138,89 ribu per kapita per bulan untuk non-makanan.

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Permasalahan di Provinsi Lampung adalah masih tingginya angka kemiskinan jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera(Hefner 2009)(Kesesuaian et al. 2020). Data Statistik menunjukkan bahwa tahun 2017 sampai 2021 angka penduduk miskin Provinsi Lampung menduduki urutan ke tiga dari sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera yaitu sebesar 14,90 persen. Rata-rata tingkat kemiskinan tertinggi yaitu terjadi di provinsi Nangro Aceh Darussalam yaitu sebesar 18,34 persen. Sedangkan rata-rata persentase kemiskinan terendah terjadi di provinsi Bangka Belitung yaitu sebesar 5,37 persen(BPS Lampung 2021). Berikut disajikan tabel data persentase penduduk miskin menurut provinsi se pulau Sumatera.

**Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia (ribu) 2016-2021**

NO	Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indonesia	28.005.39	27.771.22	25.949.8	25.144.72	26.424.02	27.549.69
2	Aceh	848,44	872,61	839,49	819,44	814,91	850.26
3	Sumatera Utara	1.455.95	1.453.87	1.324.98	1.282.04	1.283.29	1273.07
4	Sumatera Barat	371,56	364,51	357,13	348,22	344,23	339.93
5	Riau	515,4	514,62	500,44	490,72	483,39	496.66
6	Jambi	289,8	286,55	281,69	274,32	277,8	279.86
7	Sumatera Selatan	1.101.19	1.086.92	1.068.27	1.073.74	1.081.58	1116.61
8	Bengkulu	328,61	316,98	301,81	302,3	302,58	291.79
9	Lampung	1.169.6	1.131.73	1.097.05	1.063.66	1.049.32	1007.02
10	Kepulauan Bangka Belitung	72,76	74,09	76,26	68,38	68,39	69.70
11	Kepulauan Riau	120,41	125,37	131,68	128,46	131,97	137.75

*Sumber Data: penduduk miskin Angka 2021. Badan Pusat Statistik provinsi lampung*

Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah provinsi Lampung kian fokus dalam menanggulangi masalah kemiskinan tersebut (Statistik 2019). Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Badan Pusat Statistik 2021) Oleh karena itu pemerintah provinsi Lampung kian fokus dalam menanggulangi masalah kemiskinan.

Dilihat dari keadaan geografis Provinsi Lampung yang merupakan gerbang lalu lintas kegiatan ekonomi antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera yang memiliki potensi sebagai salah satu simpul distribusi barang dan jasa nasional yang ditunjang dari Sumber Daya Alam yang di miliki oleh Provinsi Lampung (No et al. 2020). Seharusnya Provinsi Lampung potensi ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan juga pendapatan Provinsi Lampung sehingga dapat menekan angka kemiskinan yang tinggi. Tetapi realita yang terjadi Provinsi Lampung masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera (Santoso 2017). Berhasilnya pembangunan disuatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan suatu daerah dapat berjalan dengan baik jika kesejahteraan masyarakat meningkat, yang tercermin dalam laju penurunan jumlah

penduduk miskin(BPS 2017). Masih tingginya jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Lampung nampaknya belum begitu berhasil. Berikut adalah data penduduk miskin menurut data BPS Provinsi Lampung 2016-2021 yaitu:

**Tabel 1.3 Persentase Penduduk miskin**

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (Persen)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lampung Barat	15.06	14.32	13.54	12.92	12.52	12.82
Tanggamus	14.05	13.25	12.48	12.05	11.68	11.81
Lampung Selatan	16.16	15.16	14.86	14.31	14.08	14.19
Lampung Timur	16.98	16.35	15.76	15.24	14.62	15.08
Lampung Tengah	13.28	12.90	12.62	12.03	11.82	11.99
Lampung Utara	22.92	21.55	20.85	19.90	19.30	19.63
Way Kanan	14.58	14.06	13.52	13.07	12.90	13.09
Tulang Bawang	10.20	10.09	9.70	9.35	9.33	9.67
Pesawaran	17.31	16.48	15.97	15.19	14.76	15.11
Pringsewu	11.73	11.30	10.50	10.15	9.97	10.11
Mesuji	8.00	7.66	7.55	7.47	7.33	7.54
Tulang Bawang Barat	8.40	8.11	8.10	7.75	7.39	8.32
Pesisir Barat	15.91	15.61	14.98	14.48	14.29	14.81
Bandar Lampung	10.15	9.94	9.04	8.71	8.81	9.11
Metro	10.15	9.89	9.14	8.68	8.47	8.93
Provinsi Lampung	14.29	13.69	13.14	12.62	12.34	12.62
Indonesia	28.005.39	27.771.22	25.949.8	25.144.72	26.424.02	27.549.69

*Sumber Data: penduduk miskin Angka 2021. Badan Pusat Statistik provinsi lampung*

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin provinsi Lampung mengalami Laju penurunan yang signifikan, selama tahun 2016 sampai 2021 jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mengalami penurunan, dilihat dari tahun 2016-2021 jumlah penduduk miskin yang tertinggi adalah Kabupaten Lampung Utara mencapai 19,63 persen, sedangkan kabupaten/kota Pesawaran berada pada urutan kedua mencapai 15,11 persen dan yang terendah Kabupaten/Kota Mesuji 7,54 persen. Meskipun berbagai kebijakan pemerintah provinsi telah dilakukan akan tetapi angka kemiskinan masih saja tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain, padahal tingkat pertumbuhan ekonominya menjadi terpesat atau terbaik dibandingkan dengan provinsi lainnya(BPS Provinsi Lampung 2020b).

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan strategi pemerintah provinsi dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Lampung.

## **B. BATASAN MASALAH**

Berdasarkan Permasalahan yang ada terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan di antaranya rendahnya indeks pembangunan manusia, rendahnya produktifitas di suatu daerah yang tercermin pada rendahnya pertumbuhan ekonomi, serta tingginya angka pengangguran.

## **C. RUMUSAN MASALAH**

Permasalahan dalam rumusan ini mengenai upaya pemerintah provinsi yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Lampung Tengah diantaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka dan tinjauan dari ilmu pemerintahan dalam menghentaskan kemiskinan. dalam penelitian ini akan membahas secara jelas mengenai hal sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemerintah provinsi Kabupaten Lampung Tengah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia tahun 2021?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi pemerintah provinsi kabupaten lampung tengah dalam peningkatan indeks pembangunan manusia tahun 2021?

## **D. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari tulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah provinsi Kabupaten Lampung Tengah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia tahun 2021
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi pemerintah provinsi kabupaten lampung tengah dalam peningkatan indeks pembangunan manusia tahun 2021

## **E. MANFAAT PENELITIAN**

Tulisan ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis di harapkan hasil penelitian ini menambah wawasan keilmuan dalam pemerintahan khususnya pertumbuhan pembangunan manusia yang di tinjau dari perspektif ilmu pemerintahan. Serta manfaat bagi ilmu pengetahuan untuk melengkapi kajian mengenai kemiskinan dengan sudut pandang yang berbeda
2. Secara Praktis Untuk pengambil kebijakan penelitian ini di harapkan mampu memberikan Informasi yang berguna berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung Tengah sehingga dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan dan pilihan strategi pengambilan kebijakan.

